

LAPORAN THESIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI RUMAH SAKIT PERUJUK
TERHADAP TUNTUTAN MALAPRAKTIK PADA RUJUKAN KASUS
GAWAT DARURAT DALAM JAMINAN BPJS KESEHATAN

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



JASON

21.C2.0068

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAK

Rumah sakit berhadapan dengan risiko tuntutan hukum, termasuk tuntutan malapraktik yang dapat mempengaruhi reputasi dan stabilitas keuangan. Sengketa malapraktik pada rujukan kasus gawat darurat masih memerlukan klarifikasi yang mendalam dalam hukum kesehatan di Indonesia. Secara hukum, rumah sakit perujuk dijamin untuk memberikan pelayanan gawat darurat sesuai undang-undang. Namun, dalam praktiknya, terkadang terdapat keterbatasan sumber daya, seperti tenaga medis dan peralatan. Masalah semakin rumit ketika melibatkan jaminan BPJS Kesehatan. Kesenjangan ini menjadi daya tarik penelitian untuk mengeksplorasi langkah-langkah rumah sakit dalam memperkuat perlindungan hukumnya terhadap tuntutan malapraktik dalam skema rujukan jaminan BPJS Kesehatan dalam menangani kasus gawat darurat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan dan perlindungan hukum, serta cara penanggulangan atau antisipasi terhadap tuntutan malapraktik kepada rumah sakit dalam memberikan rujukan kasus gawat darurat dengan jaminan BPJS Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan pemeriksaan terhadap data sekunder yakni semua peraturan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Hasil dan kesimpulan penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit, dan regulasi lainnya dianggap sudah mampu memberikan kerangka hukum yang jelas bagi rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dan tidak bertentangan satu dengan lainnya. Prinsip-prinsip etika seperti otonomi pasien, keadilan, *non-maleficence*, dan *beneficence* menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah cukup komprehensif secara teoritis, evaluasi lanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang efektif di lapangan dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan guna memastikan akses kesehatan yang adil dan merata, terutama dalam situasi gawat darurat. Dengan demikian, pendekatan holistik yang melibatkan aspek hukum, komunikasi, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci dalam menanggulangi tuntutan malapraktik. Diperlukan upaya terus-menerus untuk memperkuat regulasi hukum, meningkatkan transparansi pelaporan, melibatkan ahli hukum, dan melakukan audit internal berkala guna meminimalkan risiko tuntutan malapraktik dan memberikan perlindungan hukum optimal bagi semua pihak.

Kata kunci: BPJS Kesehatan, gawat darurat, perlindungan hukum, malapraktik, rumah sakit, sistem rujukan.

ABSTRACT

Hospitals face the risk of legal claims, including malpractice suits can impact their reputation and financial stability. Disputes regarding malpractice in emergency referral cases still require thorough clarification within Indonesia's healthcare law. Legally, referral hospitals are mandated to provide emergency care in accordance with the law. However, in practice, resource limitations, such as medical staff and equipment, sometimes occur. The issue becomes more complex when involving the BPJS Kesehatan insurance scheme. This gap has sparked research interest to explore hospitals' measures in strengthening their legal protection against malpractice claims within the BPJS Kesehatan referral scheme in handling emergency cases.

This study aims to identify and analyze legal regulations, legal protections, and methods of addressing or anticipating malpractice claims for hospitals in emergency referral cases in the era of the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). The research employs a normative method with a statute approach involving examination of all relevant laws and regulations pertaining to the legal issue under investigation.

The research concludes that legal regulations such as Law Number 17 of 2023, Government Regulation Number 47 of 2021, and other regulations provide a clear framework for hospitals in providing healthcare services. Ethical principles such as patient autonomy, justice, non-maleficence, and beneficence are crucial foundations in decision-making in emergency situations. Although the existing legal framework is theoretically comprehensive enough, further evaluation is needed to ensure effective implementation in the field and to identify areas requiring improvement to ensure fair and equitable access to healthcare, especially in emergency situations. Thus, a holistic approach involving legal, communication, and service quality aspects is key to addressing malpractice claims. Continuous efforts are needed to strengthen legal regulations, enhance transparency in reporting, involve legal experts, and conduct periodic internal audits to minimize the risk of malpractice claims and provide optimal legal protection for all parties involved.

Keywords: BPJS Kesehatan, emergency, legal protection, malpractice, hospitals, referral system.